

Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Desa Cemengkalang Kabupaten Sidoarjo

Bunga Avrillia Putri¹, Flowry Madaghta², Nia Putri Agung³, Aviatul Rofikasari⁴,
Muhammad Fahrul Rozy Khamdani⁵

^{1,2,3,4,5} S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: bunga.23084@mhs.unesa.ac.id¹, flowry.23054@mhs.unesa.ac.id², nia.23072@mhs.unesa.ac.id³, aviatul.23072@mhs.unesa.ac.id⁴, muhammadfahrul.23072@mhs.unesa.ac.id⁵

Article History:

Received: 26 Mei 2025

Revised: 31 Juli 2025

Accepted: 09 Agustus 2025

Keywords: *efektivitas, efiseinsi, anggaran belanja, desa, keuangan desa*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja Desa Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaan anggaran desa menjadi indikator penting dalam menilai tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada laporan realisasi anggaran tahun 2022–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran tergolong tinggi, sedangkan efisiensinya berada pada kategori sedang, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara belanja yang direncanakan dan pelaksanaan program di lapangan. Diperlukan evaluasi berkala terhadap perencanaan anggaran dan pelatihan pengelolaan keuangan desa agar pemanfaatan anggaran lebih optimal.*

PENDAHULUAN

Berisi deskripsi tentang latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yg diselesaikan, ulasan penelitan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yg relevan dengan penelitian yang dilakukan, serta didukung dengan *literature review* yang relevan. Referensi menggunakan *APA Style 6 th edition* dan penelitian ini menggunakan bodynote. (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1)

Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat, setiap desa dituntut untuk mengelola keuangannya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Cemengkalang, sebagai salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo, juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup signifikan setiap tahunnya. Namun, masih terdapat permasalahan dalam implementasi anggaran, seperti keterlambatan realisasi program dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk menilai seberapa efektif dan efisien realisasi anggaran belanja desa tersebut (Arifin, 2021).

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin diperkuat oleh regulasi nasional, desa sebagai satuan pemerintahan terendah memiliki peran yang sangat vital dalam proses pembangunan nasional. Pemerintah pusat melalui kebijakan Dana Desa telah memberikan

kewenangan dan sumber daya keuangan yang signifikan kepada pemerintah desa untuk mengelola pembangunan serta pelayanan publik secara mandiri dan partisipatif. Hal ini diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan dari bawah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, dalam implementasinya, terdapat tantangan tersendiri, khususnya dalam pengelolaan anggaran belanja desa yang berkaitan langsung dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan desa (Budhi, 2019).

Efektivitas dan efisiensi dalam realisasi anggaran belanja menjadi parameter penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah desa. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana anggaran yang direncanakan dapat mencapai sasaran dan tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Sementara itu, efisiensi lebih menekankan pada optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, yaitu bagaimana anggaran yang terbatas dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kedua konsep ini sangat penting untuk dianalisis guna mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh (Hadi & Arif, 2020).

Desa Cemengkalang di Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu desa yang mendapat alokasi Dana Desa dalam jumlah yang cukup besar dari tahun ke tahun. Dana ini dialokasikan untuk mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kegiatan-kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan desa. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit ditemukan kendala yang menghambat tercapainya tujuan program secara optimal. Permasalahan tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari anggaran desa (Kurniawan & Sari, 2018).

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah desa adalah kurangnya kemampuan dalam menyusun perencanaan anggaran yang realistis dan tepat sasaran. Perencanaan yang tidak berbasis pada data kebutuhan riil masyarakat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara kegiatan yang direncanakan dan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, kegiatan yang telah dilaksanakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini menunjukkan rendahnya efektivitas penggunaan anggaran yang seharusnya dapat diarahkan pada program-program yang benar-benar mendesak dan bermanfaat langsung bagi warga desa (Setiawan & Ahmad, 2022).

Selain aspek efektivitas, efisiensi pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian serius. Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi akan menyebabkan pemborosan anggaran, baik karena proses pengadaan barang dan jasa yang tidak kompetitif maupun karena lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini sering terjadi karena masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah desa, terutama dalam hal pemahaman teknis mengenai tata kelola keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Sumarno, 2020).

Permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas dan efisiensi anggaran adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Idealnya, perencanaan anggaran desa harus melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi. Namun, dalam praktiknya, banyak keputusan anggaran yang masih bersifat top-down dan tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, kegiatan yang dilaksanakan tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, bahkan tidak jarang menimbulkan resistensi sosial (Widiastuti & Suhartono, 2017).

Keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi (monev) juga menjadi penyebab utama

rendahnya kualitas pelaksanaan anggaran desa. Banyak desa yang belum memiliki sistem monev yang memadai untuk mengukur pencapaian indikator program dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Padahal, keberadaan sistem ini sangat penting untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana, dan apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa sistem evaluasi yang baik, pengambilan keputusan di periode selanjutnya berisiko tidak berdasarkan data dan informasi yang valid (Yusuf, 2019).

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga menjadi sorotan publik, terutama dalam kaitannya dengan potensi penyimpangan dan korupsi. Walaupun pemerintah telah menerapkan sistem pelaporan berbasis aplikasi seperti Siskeudes, namun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan SDM. Ketika informasi keuangan tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, maka peluang penyimpangan akan semakin besar, dan hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Masyarakat desa berhak untuk mengetahui sejauh mana anggaran digunakan dan apakah hasilnya telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Rizal & Prasetyo, 2021).

Desa Cemengkalang sebagai objek kajian dalam penelitian ini memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, desa ini telah mengalami transformasi dari desa agraris menjadi desa yang mulai berkembang secara ekonomi, didukung oleh keberadaan sektor industri rumahan dan UMKM. Dengan kondisi ini, kebutuhan terhadap pengelolaan anggaran yang adaptif dan strategis semakin meningkat. Pemerintah desa dituntut untuk tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga mampu merespons perubahan kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat (Sutrisno & Handayani, 2021).

Penelitian terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran belanja desa sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Dengan mengetahui sejauh mana anggaran telah digunakan secara optimal dan apa saja kendala yang dihadapi dalam realisasinya, maka akan ditemukan solusi-solusi konkrit yang dapat memperbaiki tata kelola keuangan desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan desa yang lebih terarah dan berkelanjutan (Fitriani, 2024).

Analisis yang mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi ini juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat. Pemerintah desa sebagai pengelola anggaran publik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dalam pelaporan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik (Hakim & Suwondo, 2020).

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademik dan praktik tata kelola pemerintahan desa. Banyak studi sebelumnya yang menyoroti aspek pengelolaan keuangan desa secara umum, namun masih sedikit yang fokus pada studi kasus di tingkat desa dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara terpadu. Oleh karena itu, penelitian di Desa Cemengkalang dapat menjadi rujukan bagi desa lain dalam memperbaiki tata kelola anggarannya (Rakhmadi & Anwar, 2020).

Relevansi penelitian ini semakin meningkat mengingat terus berkembangnya kebijakan pemerintah mengenai penguatan desa melalui Dana Desa. Jika anggaran yang begitu besar tidak dikelola secara efektif dan efisien, maka potensi terjadinya ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan distribusi manfaat akan semakin besar. Dengan demikian, kemampuan desa dalam mengelola keuangan secara cerdas akan menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional dari level bawah (Putra & Suryani, 2021).

Efektivitas dan efisiensi anggaran juga berdampak langsung terhadap kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika masyarakat melihat adanya manfaat nyata dari program-program yang didanai dari APBDDes, maka partisipasi dan dukungan masyarakat akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika anggaran tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakpuasan dan krisis kepercayaan yang pada akhirnya menghambat pembangunan (Wicaksono, 2022).

Pentingnya reformasi pengelolaan keuangan desa juga didorong oleh harapan agar desa dapat lebih mandiri secara fiskal dan administratif. Pengelolaan anggaran yang efisien akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi desa untuk berinovasi dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan, tanpa semata-mata bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Astuti & Handoko, 2019)

Dengan latar belakang tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian yang komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja di Desa Cemengkalang. Penelitian ini akan menggali sejauh mana pemerintah desa telah berhasil menggunakan anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran pembangunan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong efektivitas dan efisiensi tersebut.

Kajian ini tidak hanya akan melihat data realisasi anggaran secara statistik, tetapi juga menganalisis konteks sosial dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan program. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih holistik mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi yang aplikatif dan tepat sasaran. Sebagai langkah awal dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan desa, analisis ini diharapkan dapat memberikan dorongan perubahan positif di tingkat desa, khususnya dalam pengambilan kebijakan anggaran, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja Desa Cemengkalang?
2. Bagaimana tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja Desa Cemengkalang?
3. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan anggaran belanja desa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kuantitatif** dengan teknik analisis **rasio efektivitas dan efisiensi** terhadap data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) tahun 2022 dan 2023. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara dengan perangkat desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kuantitatif** dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sejauh mana efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja di Desa Cemengkalang. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran nyata mengenai penggunaan anggaran berdasarkan data empiris yang tersedia, serta memungkinkan peneliti untuk mengukur tingkat ketercapaian program/kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- **Data primer** diperoleh melalui wawancara terstruktur dan observasi langsung terhadap aparat desa, khususnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan Keuangan serta beberapa tokoh masyarakat.
 - **Data sekunder** diperoleh dari dokumen resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), APBDDes, Laporan Realisasi Anggaran, dan laporan pertanggungjawaban anggaran dari tahun 2022 hingga 2024.
2. **Teknik Pengumpulan Data**
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:
- **Wawancara:** Untuk mendapatkan informasi kualitatif terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan anggaran.
 - **Observasi langsung:** Untuk melihat pelaksanaan program yang telah direalisasikan serta dampaknya di masyarakat.
 - **Dokumentasi:** Untuk mendapatkan data angka-angka realisasi anggaran, target, dan output kegiatan.
3. **Teknik Analisis Data**
Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- **Analisis Efektivitas:** Mengukur sejauh mana anggaran yang direncanakan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan kegiatan, dengan menggunakan rumus:
 - **Efektivitas** diukur dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \right) \times 100\%$$

- **Efisiensi** diukur dengan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{Total Belanja Nyata}}{\text{Output yang Dihasilkan}} \right)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja Desa Cemengkalang dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024. Data diperoleh dari dokumen APBDDes, laporan realisasi anggaran, serta wawancara dengan perangkat desa. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan dari temuan lapangan yang diuraikan secara mendalam.

1. Tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi anggaran belanja Desa Cemengkalang selama tiga tahun terakhir menunjukkan variasi dalam pencapaiannya. Tahun 2022, total belanja direncanakan sebesar Rp2.150.000.000 dan terealisasi sebesar Rp1.975.000.000, sehingga efektivitasnya mencapai sekitar 91,8%. Pada tahun 2023, anggaran sebesar Rp2.300.000.000

teralisasi sebesar Rp2.120.000.000 atau sekitar 92,1%. Sementara tahun 2024 (hingga kuartal III), realisasi mencapai 85,5% dari anggaran sebesar Rp2.500.000.000.

Pencapaian efektivitas di atas 90% selama dua tahun menunjukkan bahwa secara umum penggunaan anggaran sudah berada pada kategori “efektif”. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan efektivitas, yang menurut hasil wawancara disebabkan oleh keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, serta adanya peralihan prioritas kegiatan akibat faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pusat dan bencana alam lokal (banjir).

Efektivitas yang tinggi dicapai pada program-program pembangunan fisik seperti pengerasan jalan desa, pembuatan saluran irigasi tersier, serta pembangunan posyandu dan balai RW. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang bersifat fisik cenderung lebih mudah untuk diukur dan dilaksanakan dibandingkan program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Efektivitas merupakan indikator utama dalam menilai sejauh mana perencanaan anggaran belanja desa mampu direalisasikan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks Desa Cemengkalang, efektivitas realisasi anggaran belanja diukur berdasarkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan jumlah anggaran yang benar-benar terealisasi dalam satu tahun anggaran. Data selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran cenderung tinggi, namun tidak lepas dari dinamika implementasi di lapangan.

Pada tahun anggaran 2022, alokasi belanja Desa Cemengkalang sebesar Rp2.150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp1.975.000.000. Ini berarti sekitar 91,8% anggaran dapat direalisasikan. Tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan efektivitas, yakni sebesar 92,1% dari total anggaran sebesar Rp2.300.000.000. Adapun hingga kuartal III tahun 2024, dari total anggaran sebesar Rp2.500.000.000 telah terealisasi Rp2.137.500.000 atau sekitar 85,5%. Penurunan efektivitas pada tahun terakhir ini menjadi perhatian tersendiri karena menandakan potensi hambatan dalam pelaksanaan program.

Pencapaian di atas 90% menunjukkan kategori “efektif” menurut standar pengukuran efektivitas anggaran dalam pemerintahan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes mampu dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) tahunan. Efektivitas yang tinggi menjadi cermin dari koordinasi yang baik antara aparat desa, lembaga kemasyarakatan, dan mitra pelaksana kegiatan.

Program-program yang mendukung capaian efektivitas tertinggi antara lain pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, normalisasi saluran air, serta renovasi balai desa. Keberhasilan program-program ini didorong oleh ketersediaan dokumen teknis yang lengkap sejak tahap awal serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan. Di samping itu, penyusunan jadwal kegiatan yang realistis juga menjadi faktor penting dalam pencapaian target pelaksanaan program.

Namun demikian, terdapat pula kegiatan yang realisasinya tidak sesuai target karena berbagai kendala. Misalnya, program pelatihan keterampilan untuk ibu rumah tangga hanya mampu terealisasi sekitar 60% karena kurangnya peserta dan waktu pelaksanaan yang bertabrakan dengan musim tanam. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak semata soal capaian kuantitatif, melainkan juga ketercapaian tujuan program secara kualitatif.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas anggaran sangat dipengaruhi oleh kesiapan perencanaan teknis. Kegiatan yang dirancang dengan jelas, disertai indikator kinerja yang terukur, dan dukungan logistik yang memadai lebih cenderung terealisasi secara efektif. Sebaliknya, kegiatan yang hanya bersifat administratif atau politis tanpa kajian mendalam

terhadap kebutuhan masyarakat cenderung gagal mencapai target realisasi.

Selain aspek perencanaan, efektivitas juga dipengaruhi oleh kualitas pelaporan dan pengawasan internal. Di Desa Cemengkalang, keberadaan tim pengelola kegiatan yang berpengalaman memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Tim ini mampu merespons cepat jika terjadi hambatan teknis di lapangan, seperti keterlambatan pengiriman material atau konflik dalam pelaksanaan kegiatan.

Lebih lanjut, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran juga cukup signifikan. Dalam beberapa kesempatan, BPD memberikan masukan yang bersifat strategis seperti penyesuaian waktu pelaksanaan dan pemangkasan anggaran kegiatan yang dinilai tidak produktif. Hal ini memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Efektivitas anggaran juga ditentukan oleh stabilitas kondisi sosial dan ekonomi desa. Selama masa pandemi dan pascapandemi, Desa Cemengkalang mengalami penyesuaian dalam alokasi anggaran. Sebagian dana dialihkan untuk bantuan sosial, yang meskipun tidak menghasilkan output fisik, namun memiliki dampak sosial yang besar bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa efektivitas juga perlu dilihat dari perspektif kebermanfaatan dan urgensi.

Ketika dibandingkan dengan desa-desa tetangga di wilayah Kecamatan Sidoarjo, efektivitas anggaran Desa Cemengkalang tergolong baik. Beberapa desa lain hanya mampu merealisasikan anggaran sekitar 70–80% karena masalah administratif, minimnya SDM, serta konflik internal. Hal ini menunjukkan bahwa capaian efektivitas di Cemengkalang dapat menjadi model percontohan dalam pengelolaan APBDes secara profesional.

Kendati demikian, efektivitas belum sepenuhnya menjamin bahwa seluruh kegiatan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas kuantitatif perlu dilengkapi dengan evaluasi kualitatif, seperti survei kepuasan masyarakat dan penilaian keberlanjutan program. Dalam hal ini, perangkat desa perlu lebih aktif melakukan pemantauan dan pelaporan berbasis indikator hasil (outcome-based budgeting).

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas realisasi anggaran belanja Desa Cemengkalang berada pada kategori baik. Namun demikian, terdapat ruang perbaikan yang dapat dilakukan, terutama dalam aspek ketepatan waktu pelaksanaan, perencanaan yang lebih berbasis data, serta peningkatan kualitas pengawasan masyarakat. Efektivitas yang tinggi seyogianya diiringi pula dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat.

2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi anggaran dilihat dari perbandingan antara output kegiatan dan biaya yang dikeluarkan. Dari data yang dianalisis, sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan dengan biaya yang sesuai atau bahkan lebih rendah dari perencanaan. Contohnya, pembangunan jalan lingkungan dengan anggaran Rp250.000.000 hanya menghabiskan Rp240.000.000, dengan spesifikasi dan mutu pekerjaan tetap sesuai standar. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 4%.

Namun, tidak semua kegiatan berhasil dilaksanakan secara efisien. Kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda, misalnya, mengalami pembengkakan biaya sebesar 7% akibat kurangnya perencanaan logistik dan konsumsi peserta. Efisiensi juga menurun pada kegiatan pengadaan alat kebersihan desa karena perubahan harga pasar yang tidak terantisipasi sebelumnya.

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi belanja Desa Cemengkalang berada pada kisaran 95–

98%. Hal ini tergolong baik, namun menunjukkan adanya ruang perbaikan, terutama dalam aspek manajemen keuangan dan pengendalian biaya proyek. Efisiensi pengelolaan anggaran adalah ukuran untuk mengetahui sejauh mana sumber daya yang tersedia (dana desa) dapat digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya yang sekecil mungkin. Efisiensi ini tidak hanya dilihat dari aspek penghematan anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil yang dicapai dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Cemengkalang. Dalam penelitian ini, efisiensi pengelolaan anggaran diukur melalui perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan output atau hasil yang dicapai.

Pada tahun 2022, sebagian besar program yang dilaksanakan di Desa Cemengkalang dapat diselesaikan dengan efisiensi yang cukup baik. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan desa sepanjang 2 kilometer yang memakan biaya sekitar Rp240.000.000, meskipun anggaran yang disediakan adalah Rp250.000.000. Dengan demikian, terjadi penghematan sekitar 4% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana tersebut cukup efisien, karena tidak ada pemborosan anggaran dan kualitas hasil pembangunan tetap terjaga dengan baik.

Namun, meskipun beberapa program dapat diselesaikan dengan efisien, terdapat juga kegiatan yang mengalami pembengkakan biaya yang tidak diinginkan. Salah satu contoh adalah pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang diprogramkan untuk meningkatkan keterampilan pemuda desa. Pada tahun 2023, program pelatihan ini direncanakan dengan anggaran sebesar Rp100.000.000, namun realisasinya membengkak menjadi Rp107.000.000. Kenaikan biaya tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesalahan perencanaan terkait logistik, serta fluktuasi harga bahan dan alat yang dibutuhkan selama pelatihan. Walaupun kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan, kenaikan biaya yang tidak direncanakan dapat mengurangi tingkat efisiensi.

Selain itu, kegiatan pengadaan alat kebersihan desa pada tahun 2024 juga mengalami pemborosan anggaran. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp80.000.000 ternyata tidak cukup untuk membeli seluruh peralatan yang dibutuhkan karena ketidaktepatan estimasi harga dan ketidakpastian pasokan barang. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun anggaran sudah direncanakan dengan baik, faktor eksternal seperti perubahan harga pasar dan ketersediaan barang dapat memengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Desa Cemengkalang dapat dikatakan cukup baik dengan rata-rata efisiensi mencapai 95–98% setiap tahunnya. Walaupun ada beberapa kendala yang menyebabkan pembengkakan biaya, secara umum perangkat desa mampu mengelola anggaran dengan bijaksana. Program-program pembangunan fisik yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, saluran irigasi, dan renovasi fasilitas umum, menunjukkan pengelolaan yang efisien, dengan anggaran yang tidak berlebihan dan hasil yang optimal.

Beberapa faktor yang mendukung efisiensi pengelolaan anggaran antara lain adalah adanya **perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan koordinasi yang baik antara perangkat desa dan masyarakat**. Desa Cemengkalang juga mendapat dukungan dari pihak ketiga seperti konsultan pengadaan yang memberikan rekomendasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan proyek, sehingga mengurangi potensi pemborosan. Selain itu, kesadaran perangkat desa untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan juga berperan penting dalam mencegah pemborosan dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Namun, untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut, perlu adanya **pelatihan bagi aparat desa** terkait dengan perencanaan anggaran dan manajemen keuangan. Meskipun perangkat desa

sudah cukup kompeten, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan anggaran dan evaluasi kegiatan akan membantu mengurangi kesalahan yang dapat menyebabkan pemborosan biaya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penggunaan **aplikasi sistem informasi manajemen keuangan desa** yang dapat membantu perangkat desa untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dengan lebih efisien dan transparan.

Selain itu, **pengawasan yang lebih ketat** terhadap pengadaan barang dan jasa perlu diperkuat, karena pengadaan sering menjadi titik rawan pemborosan anggaran. Ke depan, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan efisiensi dengan memastikan bahwa harga barang sesuai dengan pasaran dan menghindari potensi mark-up harga.

Beberapa contoh efisiensi lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi dalam program-program pelatihan masyarakat. Sebagai contoh, pelatihan kewirausahaan tidak hanya dilakukan melalui cara konvensional seperti pelatihan langsung, tetapi juga memanfaatkan platform daring yang memungkinkan partisipasi lebih banyak orang dengan biaya yang lebih rendah. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menghemat anggaran sekaligus meningkatkan cakupan peserta pelatihan.

Meskipun tingkat efisiensi anggaran sudah cukup baik, ada peluang untuk meningkatkan **efisiensi operasional** dalam program-program yang memerlukan pengeluaran rutin, seperti pemeliharaan infrastruktur. Pemeliharaan yang tepat waktu dan berkala dapat mengurangi biaya perbaikan yang lebih besar di masa mendatang, serta mengoptimalkan daya guna infrastruktur yang telah dibangun. Dalam hal ini, penting bagi Desa Cemengkalang untuk menyusun rencana pemeliharaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia.

Terakhir, faktor **partisipasi aktif masyarakat** juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi anggaran. Masyarakat yang aktif dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan lebih menjaga kualitas dan meminimalkan pemborosan, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil akhir yang dicapai. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk mencapai efisiensi yang lebih baik.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas dan Efisiensi

Beberapa faktor yang mendukung efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran antara lain:

- **Partisipasi masyarakat** yang tinggi dalam musyawarah desa (musdes) dan pelaksanaan kegiatan.
- **Transparansi dan akuntabilitas** perangkat desa dalam menyampaikan laporan anggaran kepada publik.
- **Kemampuan teknis aparat desa** yang cukup baik dalam mengelola dana desa.

Sementara itu, hambatan yang dihadapi mencakup:

- **Keterlambatan transfer dana desa** dari pemerintah pusat dan kabupaten yang menyebabkan molonya jadwal kegiatan.
- **Kurangnya SDM di bidang administrasi keuangan**, sehingga pengelolaan laporan keuangan tidak optimal.
- **Ketergantungan pada konsultan eksternal** untuk penyusunan dokumen teknis, yang kadang memakan waktu dan biaya.

Selain itu, faktor eksternal seperti **cuaca ekstrem dan inflasi harga bahan bangunan** turut memengaruhi realisasi anggaran. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan fisik yang menjadi tulang punggung pembangunan desa.

4. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran

Dari hasil pengamatan dan wawancara, ditemukan bahwa perencanaan anggaran di Desa Cemengkalang sudah cukup partisipatif melalui forum musyawarah dusun dan musdes. Namun, masih ada kecenderungan untuk menggunakan pendekatan “copy-paste” dalam menyusun rencana kerja tahunan. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan berulang tanpa evaluasi mendalam terhadap dampaknya bagi masyarakat.

Kegiatan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat dan memiliki output jelas cenderung direalisasikan secara efektif. Sebaliknya, kegiatan yang bersifat seremonial atau pelatihan yang tidak dikaitkan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, cenderung tidak efektif meskipun anggarannya terserap.

5. Komparasi Antartahun dan Implikasi Kebijakan

Jika dibandingkan antartahun, terlihat bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran mengalami fluktuasi yang erat kaitannya dengan kemampuan manajemen keuangan desa dan faktor kebijakan fiskal dari pusat. Misalnya, pada tahun 2023, adanya kebijakan pemangkasan dana transfer akibat refocusing anggaran pasca-pandemi berdampak pada pengurangan program sosial. Namun perangkat desa mampu beradaptasi dengan mengalihkan dana ke kegiatan produktif seperti pelatihan digitalisasi UMKM.

Implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah pentingnya meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaporan keuangan desa melalui pelatihan aparatur desa secara berkala. Pemerintah kabupaten juga perlu mempercepat proses pencairan dana dan memberikan pendampingan teknis yang lebih intensif untuk desa.

6. Perspektif Masyarakat terhadap Realisasi Anggaran

Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 50 warga Desa Cemengkalang, sebanyak 74% responden menyatakan puas terhadap penggunaan anggaran desa dalam tiga tahun terakhir. Mereka merasa bahwa program pembangunan fisik dan bantuan sosial telah menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Namun, 26% lainnya menilai bahwa program pemberdayaan masih belum dirasakan manfaatnya secara konkret.

Sebagian warga juga mengusulkan adanya papan informasi realisasi anggaran yang diperbarui secara berkala di setiap dusun agar transparansi dapat lebih ditingkatkan. Selain itu, usulan peningkatan kualitas musyawarah desa juga muncul sebagai aspirasi agar keputusan anggaran benar-benar berbasis kebutuhan lapangan.

Berdasarkan analisis data:

- **Efektivitas Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2022 dan 2023, efektivitas berada di atas 90%, yang berarti bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Namun demikian, beberapa program fisik mengalami keterlambatan penyelesaian.

- **Efisiensi Realisasi Anggaran**

Rasio efisiensi menunjukkan angka 75%–80%, yang menandakan penggunaan sumber daya belum optimal. Penyebabnya antara lain adalah pengadaan barang dan jasa yang tidak melalui perencanaan matang serta kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan anggaran.

- **Faktor Penghambat**

Meliputi kurangnya koordinasi antarperangkat desa, keterlambatan pencairan dana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan.

KESIMPULAN

Realisasi anggaran belanja Desa Cemengkalang secara umum telah berjalan **efektif**, namun belum sepenuhnya **efisien**. Anggaran berhasil digunakan untuk menjalankan sebagian besar program yang telah direncanakan, namun masih terdapat pemborosan sumber daya dan ketidaktepatan dalam pelaksanaan. Berdasarkan hasil analisis mengenai **efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja** di Desa Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan anggaran di desa ini sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

1. **Efektivitas Pengelolaan Anggaran:** Program-program yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagian besar dapat terealisasi dengan baik. Pencapaian program yang lebih dari 90% menunjukkan bahwa desa ini mampu mencapai target-target pembangunan yang ditetapkan dalam perencanaan anggaran. Namun, beberapa kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga mempengaruhi efektivitasnya.
2. **Efisiensi Penggunaan Anggaran:** Pengelolaan anggaran desa di Desa Cemengkalang menunjukkan efisiensi yang cukup baik, dengan beberapa program yang berhasil menghemat biaya. Meski demikian, terdapat pembengkakan anggaran pada beberapa program, yang disebabkan oleh kenaikan harga barang dan kebutuhan logistik yang tidak terduga. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang dan akurat dalam merancang anggaran kegiatan.
3. **Faktor Penghambat dan Pendukung:** Beberapa faktor penghambat, seperti ketidakpastian harga barang dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa program, menjadi tantangan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Namun, faktor pendukung yang memperkuat pengelolaan anggaran desa termasuk adanya pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten dan transparansi dalam proses pelaporan keuangan.
4. **Rekomendasi untuk Peningkatan:** Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang lebih matang di awal, pengawasan yang lebih ketat selama pelaksanaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan anggaran secara real-time juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan menghindari pemborosan.

Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan anggaran di Desa Cemengkalang sudah cukup baik, masih ada beberapa area yang dapat diperbaiki agar proses penggunaan anggaran lebih efisien dan efektif, serta dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

Saran dan Rekomendasi

1. **Peningkatan kapasitas SDM** perangkat desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan.
2. **Optimalisasi perencanaan anggaran**, terutama dalam pengadaan barang dan jasa.
3. **Peningkatan partisipasi masyarakat** dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
4. **Monitoring dan evaluasi rutin** terhadap pelaksanaan anggaran untuk menghindari inefisiensi.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z. (2021). The impact of budget planning and monitoring on the effectiveness of government spending in rural areas. *Journal of Public Administration*, 32(4), 567-582. <https://doi.org/10.1016/j.jpap.2021.02.013>
- Budhi, A. (2019). Evaluating the efficiency of local government budget in Indonesia: A case study of village fund allocation. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(1), 35-47. <https://doi.org/10.1080/21560632.2019.1577391>
- Hadi, M., & Arif, S. (2020). Budget execution and accountability in rural development: A case study in East Java. *International Journal of Rural Management*, 16(3), 125-139. <https://doi.org/10.1177/0973005020903292>
- Kurniawan, Y., & Sari, R. (2018). Effectiveness of financial management in village development programs in Indonesia. *Journal of Financial Management*, 21(2), 81-95. <https://doi.org/10.1108/JFM-12-2017-0035>
- Setiawan, A., & Ahmad, T. (2022). A comprehensive approach to analyzing budget allocation and its efficiency in rural development. *Asian Journal of Public Administration*, 19(2), 231-245. <https://doi.org/10.1080/10650376.2022.1943456>
- Sumarno, T. (2020). Financial management and accountability in village budget: An Indonesian case. *International Journal of Public Administration*, 43(6), 571-583. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1799835>
- Widiastuti, D., & Suhartono, P. (2017). Challenges in implementing the village fund policy: A case study in rural areas of Indonesia. *Journal of Policy and Governance*, 8(4), 104-112. <https://doi.org/10.1080/21964552.2017.1361815>
- Yusuf, M. (2019). Financial management practices in local government: A study of village fund usage in Indonesia. *Public Budgeting & Finance*, 39(1), 72-89. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12231>
- Rizal, H., & Prasetyo, B. (2021). Efficiency and transparency in local government budget implementation: The case of village fund allocation in Central Java. *Journal of Local Governance Studies*, 4(2), 55-71. <https://doi.org/10.1080/23428916.2021.1923498>
- Sutrisno, M., & Handayani, S. (2021). Budget planning and its impact on rural development projects: An empirical study in Indonesia. *Journal of Development Economics and Policy*, 24(1), 47-61. <https://doi.org/10.1108/JDEP-11-2020-0171>
- Astuti, P., & Handoko, R. (2019). Does village fund reduce poverty and disparity in East Java? *Journal of Policy Evaluation*, 4(1), 51-63. <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/2039553>
- Fitriani, H. (2024). *Evaluating the effectiveness of village fund policy in strengthening local*

- economic resilience: Evidence from Sleman Regency, Indonesia. VISIONER, 16(3), 222–236. <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/1260>*
- Hakim, L., & Suwondo, A. (2020). *Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development. Journal of Socioeconomics and Development, 3(2), 112–123. <https://www.researchgate.net/publication/346579089>*
- Putra, M. A., & Suryani, D. (2021). *The village fund program in Indonesia: Measuring the contribution to the sustainable development goals. Sustainability, 13(21), 12294. <https://doi.org/10.3390/su132112294>*
- Rakhmadi, R., & Anwar, S. (2020). *The efficiency of village government spending in Indonesia: A meta-frontier analysis. Journal of Development Studies, 8(1), 88–104. <https://www.researchgate.net/publication/339338042>*
- Wicaksono, B. (2022). *Evaluation of village fund allocation on Indonesia. Academia.edu. <https://www.academia.edu/70454497>*
- World Bank. (2021). *Village public expenditure management in Indonesia: Towards better budgeting and spending. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/689971628748237085>*